KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0TU7UIKF

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 0 5 2			H.4 X Final			
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 550 6 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RESIANTI DATUNSOLANG							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG	JUMLAH PENGHASILAN		TARIF LEBIH		Ī		
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
3 21-402-01	554.300	554.300	0	5	27.715		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :		Tanggal	dd] mm [уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0				
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal :	1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 уууу					
C.5 Nama Penandatangan :	HARI JUMADI						
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya		
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							